



LEMBARAN KALURAHAN

KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Petir)

Nomor : 10

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN PETIR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026, perlu menyusun perencanaan anggaran pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 20);
28. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 7);
29. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Petir Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Petir Tahun 2025 Nomor 05);

30. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 03);
31. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2025 Nomor 01);
32. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2025 Nomor 06);
33. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	:	Rp. 2.299.690.880,00
2. Belanja Kalurahan	:	Rp. 1.828.480.940,00
3. Surplus/(Defisit)	:	Rp. 471.209.940,00
4. Pembiayaan Kalurahan	:	Rp. 48.201.718,00
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 55.568.050,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 526.777.990,00
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	:	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 24 Desember 2025
LURAH,

ttd

SARJU

Diundangkan di Petir
pada tanggal 24 Desember 2025

CARIK,

ttd

TOMI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PETIR

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	225.371.250,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.063.072.630,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.247.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.299.690.880,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	905.775.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	677.792.174,00	
5.3.	Belanja Modal	189.965.264,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.947.942,00	
	JUMLAH BELANJA	1.828.480.940,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	471.209.940,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.568.050,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.568.050,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	526.777.990,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	266.759.490,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	260.018.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(471.209.940,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PETIR, 24 Desember 2025

LURAH

ttd

SARJU,S.I.P.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PETIR

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	225.371.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.063.072.630,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.247.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.299.690.880,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.322.251.998,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.030.326.140,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	747.834.100,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	747.834.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.183.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.183.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.099.920,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.099.920,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.462.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.462.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.988.160,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.988.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	125.856.608,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.800.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.601.344,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.601.344,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	86.665.264,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	86.665.264,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	5.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.690.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.100.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.211.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.008.000,00	DLL, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.008.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.293.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.293.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	860.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.050.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	101.742.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.510.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.572.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.572.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.135.000,00	DDS, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.135.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.890.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.640.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.825.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.080.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.360.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.760.000,00	PAD, PBP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	29.925.000,00	ADD, PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.925.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.275.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.770.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	42.115.750,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	35.250.000,00	ADD, PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.345.750,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.345.750,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	520.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	340.531.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.535.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.740.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	1.800.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.940.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	2.055.000,00	PBP
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	182.736.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In-sentif)	76.919.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.919.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.395.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.395.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.072.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.072.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.750.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	29.280.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.280.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.820.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.820.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	42.800.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	42.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	86.875.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	20.700.000,00	PBP
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	20.700.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah * *)	52.375.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.375.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	13.800.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.685.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.685.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	8.900.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8.900.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	85.373.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.475.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.475.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.475.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.940.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.075.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.075.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.000.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	3.065.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.065.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.600.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.350.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.450.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.800.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.358.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.663.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.663.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.385.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.385.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	800.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.930.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.210.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.370.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.370.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25.377.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.817.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	8.817.000,00	DLL
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.817.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.950.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.950.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.610.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.710.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	10.900.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	54.947.942,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.547.942,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.547.942,00	ADD, DLL, PBP
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.547.942,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.828.480.940,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	471.209.940,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.568.050,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	526.777.990,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(471.209.940,00)	

KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

PETIR, 24 Desember 2025

LURAH

ttd

SARJU,S.I.P.